

## **Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Sarana Lingkungan Permukiman di Balangnipa**

**Muhlis Hajar Adiputra<sup>1</sup>, Muhammad Erwin Syukri<sup>2</sup>, Rizki Mulya R<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Sinjai

E-mail : [muhlis.h.adiputra@gmail.com](mailto:muhlis.h.adiputra@gmail.com)<sup>1</sup>, [muherwinsyukri@gmail.com](mailto:muherwinsyukri@gmail.com)<sup>2</sup>, [rizkimulya666@gmail.com](mailto:rizkimulya666@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana lingkungan permukiman di Kelurahan Balangnipa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan populasi sebanyak 100 Responden menggunakan probability sampling. Teknik analisis data menggunakan Uji Chi-Kuadrat dan analisis SWOT. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dari 6 variabel yang dianalisis, faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat adalah Usia (X1) dan Jenis Pekerjaan (X4), sehingga dirumuskan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu adanya transparansi anggaran, mengawal dan mengawasi penggunaan alokasi dana, memaksimalkan tenaga dan waktu yang dimiliki, segala bentuk aspirasi dan ide-ide harus ditampung, dipertimbangkan, dan dievaluasi, mengelola dan memelihara sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dan berkesinambungan serta bertanggungjawab, dalam proses pembebasan lahan, mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 Bab II Pasal 4 (1) Tentang Pengadaan Tanah, serta melakukan pembangunan sarana lingkungan memperhatikan aspek keberlangsungan lingkungan hidup.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, Pembangunan, Sarana Lingkungan

### **Abstract**

This paper aims to find out what factors influence the low level of community participation and efforts to increase community participation in the construction of residential environmental facilities in Balannipa Village. This type of research is quantitative research with a population of 100 respondents using probability sampling. Data analysis techniques using the Chi-Square Test and SWOT analysis. The results of this study explain that of the 6 variables analyzed, the factors that influence low community participation are age (X1) and type of work (X4), so that efforts to increase community participation are formulated, namely budget transparency, overseeing and supervising the use of allocated funds, maximizing manpower and time owned, all forms of aspirations and ideas must be accommodated, considered, and evaluated, manage and maintain facilities, infrastructure, and/or public service facilities in an effective, efficient, transparent, and accountable and sustainable and responsible manner, in the process of exemption land, referring to the Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 36 of 2005 Chapter II Article 4 (1) Concerning Land Acquisition, as well as constructing environmental facilities by paying attention to environmental sustainability aspects life.

**Keyword:** Community Participation, Development, Environmental Facilities

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan permukiman di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk perkotaan baik karena faktor pertumbuhan penduduk kota itu sendiri maupun karena faktor urbanisasi. Dampak negatif urbanisasi yang telah berlangsung selama ini lebih disebabkan oleh tidak seimbangannya peluang untuk mencari nafkah di daerah pedesaan dan perkotaan (Fazaalloh, 2017; Febrianto & Syahbana, 2016). Beberapa pengamat meyakini bahwa salah satu penyebab

mengalirnya penduduk pedesaan ke kota-kota akibat kekeliruan adopsi paradigma pembangunan yang menekankan pada pembangunan industrialisasi besar-besaran yang ditempatkan di kota-kota besar yang kemudian dikenal dengan istilah AIDS (Accelerated Industrialization Development Strategy), sehingga memunculkan adanya daya tarik yang sangat kuat untuk mengadu nasibnya di kota yang dianggap mampu memberikan masa depan yang lebih baik dengan penghasilan yang lebih tinggi, sementara pendidikan dan ketrampilan yang mereka miliki kurang memadai untuk masuk di sektor formal (Fazaalloh, 2017; Prayojana et al., 2020; Rukmana & Cahyaningtias, 2021).

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan, maka kebutuhan penyediaan akan sarana permukiman akan meningkat pula, baik melalui peningkatan maupun pembangunan baru. Selanjutnya pemenuhan akan kebutuhan sarana permukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan baik oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah, sehingga kapasitas daya dukung sarana lingkungan permukiman yang ada mulai menurun. Pembangunan sarana merupakan suatu kelengkapan fasilitas lingkungan permukiman yang dapat menunjang setiap kegiatan yang terjadi di dalam lingkungan permukiman. Sarana lingkungan yang tersedia berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan perdagangan, pemerintahan, dan pelayanan umum, olahraga dan rekreasi (Pancasasti & Khaerunisa, 2018; watik et al., 2022).

Sarana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa. Melalui pembangunan infrastruktur yang ditempuh dengan pembangunan sumber daya air, transportasi, perumahan dan permukiman, energi dan ketenaga listrikan serta jaringan komunikasi dan informatika, diharapkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dapat dicapai dan daya saing ekonomi nasional secara global dapat ditingkatkan. Penyediaan sarana merupakan bagian terpenting dalam upaya pembangunan wilayah. Tersedianya sarana yang memadai dapat meningkatkan kegiatan sosial ekonomi (Halim & Aziz, 2018; Hariani et al., 2021; Krisandriyana et al., 2019; Nina, 2019), dan dengan kondisi sosial ekonomi yang baik masyarakat lebih memiliki kemampuan berpartisipasi dalam penyediaan sarana di lingkungannya. Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 2, yaitu :

1. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.
3. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
4. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota.

5. Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga.
6. Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Salah satu tahapan pelaksanaan pembangunan dimulai dari tahap perencanaan pembangunan. Pada tahap perencanaan pembangunan, pemerintah mengupayakan adanya partisipasi masyarakat dengan diadakannya musrenbang. (R et al., 2019; Suprastiyo & Musta'ana, 2019; Ulumudin & Suria, 2019) musrenbang dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi hingga nasional. Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Di dalam musrenbang tersebut masyarakat dapat mengajukan usulan atau pendapatnya dalam perumusan rencana pembangunan Desa/Kelurahan.

Partisipasi masyarakat dalam perumusan rencana pembangunan desa/kelurahan akan memiliki tiga dampak penting yaitu :

1. Masyarakat akan terhindar dari peluang manipulasi, keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa sebenarnya yang dikehendaki masyarakat.
2. Memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, semakin banyak yang terlibat semakin baik
3. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat (Dea Deviyanti, 2013: 380-394 Vol.2).Ketentuan mengenai keterlibatan masyarakat sebenarnya telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Bab VIII Pasal 60, 61, 62, 65 yang menjelaskan "setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, berhak untuk mengetahui rencana tata ruang, berperan serta dalam penyusunan tata ruang, berkewajiban dalam memelihara kualitas ruang dan berkewajiban untuk mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan".

Untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan dibutuhkan partisipasi seluruh masyarakat desa. Partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan dari suatu pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan sangat penting karena masyarakat yang mengetahui segala permasalahan yang ada serta cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Keterlibatan masyarakat diharapkan dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan (Fathy, 2019).

Berdasarkan prariset penulis yang diambil di kantor Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara. Kelurahan Balangnipa Sebagai wilayah yang menjadi kawasan ibukota kabupaten seharusnya masyarakat di Kelurahan Balangnipa bersemangat untuk memajukan kelurahannya salah satunya dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Balangnipa. Dari semua usulan masyarakat yang hadir dalam rapat musrembang tersebut kebanyakan usulan masyarakat lebih banyak mengarah kepada kegiatan fisik seperti perbaikan jalan, sarana pendidikan, olahraga dan sarana rekreasi. Namun

partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih rendah. Hal itu dapat terlihat dari data daftar hadir masyarakat pada saat rapat-rapat mengenai perencanaan pembangunan kelurahan. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tersebut terdapat 40 orang yang hadir dalam rapat dari 128 orang undangan atau baru sekitar 30%-40% partisipasi masyarakat di Kelurahan Balangnipa. (Sumber: Kantor Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan sarana lingkungan permukiman di Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dimana partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan sarana dan perlu diadakan suatu kajian untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan sarana permukiman di Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan di atas, maka hal menarik menjadi puast kajian lebih lanjut adalah seperti apa dan bagaiman efek terhadap Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sarana Lingkungan Permukiman di Kelurahan Balangnipa.

## LITERATURE REVIEW

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, adalah satu hal yang sangat penting terutama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek pembangunan (Suharto, 2014). Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, terutama dalam memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas pembangunan (Puspika Sari et al., 2020). Selanjutnya bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup, terutama dalam mengatasi permasalahan lingkungan seperti polusi, deforestasi, dan kerusakan lahan (Mariana, 2017).

Kusmiarto et al., (2020) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan sarana lingkungan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi proyek-proyek lingkungan yang berdampak pada wilayah tempat tinggal mereka.

Berikut adalah beberapa contoh cara partisipasi masyarakat dapat diintegrasikan dalam pembangunan sarana lingkungan:

1. Konsultasi publik: Pihak yang bertanggung jawab untuk pembangunan dapat mengadakan pertemuan atau konsultasi dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan umpan balik terkait proyek lingkungan. Masyarakat dapat memberikan masukan tentang dampak proyek pada lingkungan mereka, serta memberikan saran untuk mitigasi dampak negatif.
2. Pendidikan dan pelatihan: Masyarakat dapat dilibatkan dalam pelatihan atau program pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana memelihara lingkungan yang baik dan sehat. Hal ini dapat membantu memperkuat keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam merawat lingkungan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat.

3. Program partisipatif: Program-partisipatif dapat digunakan untuk memungkinkan masyarakat terlibat secara langsung dalam proyek-proyek lingkungan yang mempengaruhi wilayah mereka. Misalnya, masyarakat dapat membantu dalam penanaman pohon atau membersihkan lingkungan, sehingga mereka dapat merasa memiliki lingkungan dan memahami peran mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan.
4. Pengawasan dan monitoring: Masyarakat dapat membantu dalam pengawasan dan monitoring proyek lingkungan untuk memastikan bahwa proyek dilakukan sesuai dengan rencana dan tidak membahayakan lingkungan. Ini dapat meliputi pemantauan kualitas air dan udara, pengawasan limbah, dan pemantauan kegiatan konstruksi.

Sehingga partisipasi masyarakat dapat mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek pembangunan. Peran pemerintah dan lembaga lain juga sangat penting dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Arafah & Winarso, 2020; Mariana, 2017). Partisipasi masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang sehat dan juga dapat meningkatkan keberhasilan proyek lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan sarana lingkungan, maka proyek-proyek lingkungan dapat lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Artinya penelitian yang bersumber dari data-data primer hasil pengukuran dan pengelolaan melalui proses statistik termasuk uji hipotesis dan analisis data semua melalui ukuran numeric statistika (Cresswel, 2013). Lebih lanjut penentuan sampel berdasarkan random sampling artinya teknik pengambilan sampel dari suatu populasi yang berdasarkan pada setiap elemen populasi yang, dalam hal ini elemen yang dimaksud berdarakn populasi masyarakat di Kelurahan Balangnipa yang mencapai 5.513 Jiwa yang terbagi dalam 1.039 Kepala Keluarga. Secara spesifik diuraikan melalui tabel berikut%:

*Tabel 1. Jumlah dan Persentase Responden, berdasarkan sebaran setiap Lingkungan*

No	Lingkungan	Jumlah KK	Jumlah Responden	Persentase
1	Tekolampe	168	17	10%
2	Ulu Salo 1	244	20	10%
3	Ulu Salo 1	175	18	10%
4	Tokinjong	263	26	10%
5	Passae	189	19	10%

Kemudian dari jumlah populasi tersebut maka ditentukanlah 10% dari seluruh populasi atau dengan memilih 100 Kepala Keluarga secara acak sebagai sampel. Dari jumlah tersebut tersebar dari di seluruh Wilayah/Teritoril Kelurahan Balangnipa.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Hasil dan Analisa Data****1. Sarana Lingkungan Permukiman di Kelurahan Balangnipa***Tabel 2. Sarana Lingkungan Permukiman*

No.	Sarana	Nama sarana	Ketersediaan	Kondisi
1.	Pemerintahan dan pelayanan umum	a. kantor kelurahan	1 buah	Baik Baik
		b. balai pertemuan umum	2 buah	
2.	Kesehatan	a. puskesmas	1 buah	Baik, 2
		b. posyandu	4 buah	
3.	Pendidikan	a. perpustakaan	1 buah	Baik 3 Baik 2 Kurang baik 4 Baik 1 Kurang baik Baik Baik Baik Baik
		b. gedung PAUD	5 buah	
		c. gedung TK	5 buah	
		d. gedung SD	9 buah	
		e. gedung SMP	2 buah	
		f. gedung SMA	4 buah	
		g. gedung perguruan tinggi	2 buah	
4.	Peribadatan	a. masjiid	12 buah	11 baik, 1 kurang baik
		b. musholla	6 buah	
5.	Olahraga	a. lapangan Sepakbola	1 buah	Kurang baik Kurang baik Baik Baik Baik Baik
		b. lapangan Bulutangkis	3 buah	
		c. lapangan Futsal	1 buah	
		d. lapangan volly	1 buah	
		e. lapangan basket	1 buah	
		f. kesenian/budaya	1 buah	

*Sumber: Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Dari 60 sarana yang tersedia yang terbagi atas 5 jenis sarana, sebanyak 85% (51 sarana) dalam kondisi baik dan sebanyak 15% (9 Sarana) dalam kondisi kurang baik serta di dukung oleh persepsi pengguna 65% pengguna meyakini kondisi sudah baik. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik pengguna yang memiliki mobilitas tinggi karena bekerja dan tidak sedikit pengguna yang memiliki karakteristik pendidikan yang rendah dan usia >35tahun, lama tinggal sehingga karakteristik pengguna dengan kriteria tersebut kurang memahami fungsi dan tidak dapat memanfaatkan sarana lingkungan permukiman yang tersedia di kelurahan Balangnipa dengan baik.

**2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sarana Lingkungan Permukiman di Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara**

**Tabel 3. Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan Sarana Lingkungan Permukiman di Kelurahan Balangnipa**

No.	Sarana Lingkungan Permukiman	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi	Keterangan
1.	Balai pertemuan umum	32 orang	Renovasi
2.	Posyandu	27 orang	Renovasi
3.	Masjid	40 orang	Pembangunan dan renovasi
4.	Musholla	37 orang	Pembangunan
5.	Lapangan sepakbola	45 orang	Pemeliharaan
6.	Lapangan bulutangkis	35 orang	Pemeliharaan
7.	Lapangan futsal	50 orang	Pemeliharaan
8.	Lapanganvolley	36 orang	Pemeliharaan

Sumber: LKPJ Kelurahan Balangnipa

Berdasarkan tabel di atas, ada beberapa pelaksanaan proyek sarana lingkungan permukiman yang dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan Balangnipa. Dimana proyek yang telah di laksanakan tersebut tidak langsung diputuskan secara sepihak saja oleh tim pelaksana kegiatannya ataupun oleh pemerintah kelurahan setempat melainkan dengan melakukan penggalian gagasan yang mendalam dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan agar semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung semua, seperti yang telah dikemukakan oleh Karyati Djusmin, S.E. selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Balangnipa bahwa:

“....dalam penggalian usulan, digali dari setiap lingkungan, apakah di satu lingkungan itu dilakukan hanya sekali ataukah lebih dari sekali dengan titik lokasi yang berbeda, bergantung dari kondisi geografis lingkungan ini supaya semua kebutuhan masyarakat yang mendesak dapat tercover” (Wawancara , 5 Juli 2017).

Munculnya pembahasan proyek pembangunan sarana lingkungan permukiman dari pemerintah Kelurahan Balangnipa dalam skripsi ini dikarenakan oleh proyek pembangunan yang dikontrol oleh pemerintah kelurahan melalui mekanisme penggalian gagasan sehingga terasa sulit untuk menghadirkan partisipasi masyarakat di dalamnya.

Menurut kepala Kelurahan Balangnipa, bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat berupa pikiran atau ide, tenaga, dan uang.“....pelaksanaan program/proyek pembangunann, melibatkan masyarakat, mulai dari mengumpulkan masyarakat dan membicarakan bersama mengenai program/proyek yang akan dilaksanakan,sehingga masyarakat betul-betul berpartisipasi, mulai dari pikiran/ide, tenaga,, barang kalau dibutuhkan, bahkan uang sekalipun” (Wawancara, 5 Juli 2017).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) ternyata belum berjalan sesuai dengan yang telah dikonsepsikan dan masih terdapat banyak celah

terutama dalam hal pelaksanaan proyeknya

## **Pembahasan dan Analisa**

### **1. Usia**

Berdasarkan hasil uji Chi Kuadrat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara usia dengan partisipasi masyarakat. Ada perbedaan keaktifan berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana lingkungan permukiman di Kelurahan Balangnipa bila dilihat dari usia. responden kelompok usia 35 tahun ke atas memiliki keaktifan berpartisipasi yang relatif lebih tinggi dibanding pada kelompok usia muda (0-15 tahun dan 16-35 tahun). Rendahnya partisipasi kelompok muda ini diduga disebabkan masih ada rasa sungkan terhadap para orang tua yang dianggap lebih tua. Responden usia muda, terutama wakil karang taruna jarang sekali ikut menghadiri undangan rapat Musrembangdes. Golongan tua dianggap lebih berpengalaman dan lebih banyak memberikan pendapat baik berupa masukan, saran dalam hal menetapkan keputusan.

### **2. Jenis**

Berdasarkan hasil uji Chi Kudrat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara jenis kelamin dengan partisipasi masyarakat. keaktifan berpartisipasi dalam pembangunan sarana lingkungan permukiman di kelurahan Balangnipa, jenis kelamin laki-laki mendominasi dibandingkan perempuan. Hal ini cukup beralasan karena partisipasi yang diberikan oleh perempuan dan laki-laki dalam pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya system pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan- perbedaan hak dan kewajiban antar laki-laki dan perempuan. Menurut Soedarto et.al (1992) dalam Yulianti (2012), bahwa di dalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki hak istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya adalah kelompok laki-laki akan lebih banyak berpartisipasi.

### **3. Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan hasil uji Chi Kuadrat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat. Masyarakat dengan tingkat pendidikan tertentu mempunyai kecenderungan memiliki keaktifan berpartisipasi tertentu pula. sebagian besar masyarakat yang keaktifan berpartisipasi tinggi secara berurutan ialah mereka yang tamat SMA ke atas, kemudian tamat SMP dan keaktifan berpartisipasi rendah ditunjukkan oleh masyarakat yang berlatarbelakang tamat SD dan tidak tamat SD.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan adalah karena faktor pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikan masyarakat, semakin tinggi pula keaktifan berpartisipasi dalam pembangunan sarana lingkungan permukiman, khususnya dalam pemberian ide-ide atau pikiran. Hal ini disebabkan Karena masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang merupakan swadaya masyarakat.

### **4. Jenis Pekerjaan**

Berdasarkan hasil uji Chi Kuadrat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh

yang signifikan antara jenis pekerjaan dengan partisipasi masyarakat. Implikasi hasil uji ini adalah bahwa biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu kegiatan tertentu. Masyarakat di kelurahan Balangnipa yang bekerja di sektor pertanian, pertukangan, dan jasa memiliki keaktifan berpartisipasi yang relative lebih tinggi dibandingkan mereka yang bekerja sebagai PNS, ABRI, pegawai dan pedagang. Relatif rendahnya partisipasi masyarakat ini karena kendala jam kerja di tempat mereka bekerja sehingga akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan sedangkan pada sektor pertanian, pertukangan, dan jasa jam kerjanya lebih fleksibel.

### **5. Tingkat Penghasilan**

Berdasarkan hasil uji Chi Kuadrat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara tingkat penghasilan dengan partisipasi masyarakat. Keaktifan berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana lingkungan permukiman di kelurahan Balangnipa bila dilihat dari tingkat penghasilan. Penghasilan masyarakat di kelurahan Balangnipa berbeda-beda, maka sangat memungkinkan partisipasinya dalam pembangunan sarana lingkungan permukiman berbeda-beda. Hal tersebut ditegaskan oleh beberapa responden yang di wawancara secara langsung pada saat penelitian. Sesuai dengan penjelasan lurah Balangnipa Muh. Azharuddin Al-Anshary, S.STP. yang mengatakan:

“...kebanyakan apabila ditinjau dari partisipasi masyarakat dalam bentuk uang kebanyakan dari masyarakat yang berpenghasilan lebih, atau dikatakan orang berada. Jika orang-orang yang berpenghasilan rendah lebih memilih menyumbangkan tenaga mereka guna pembangunan...” (Wawancara, 5 Juli 2017).

Menurut keterangan dari beberapa responden, semakin tinggi penghasilan seseorang maka memungkinkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan semakin tinggi pula, akan tetapi jika penghasilan tidak stabil atau tidak rutin maka jelas akan menghambat masyarakat dalam berpartisipasi.

### **6. Lama Tinggal**

Berdasarkan hasil uji Chi Kuadrat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara lama tinggal dengan partisipasi masyarakat. lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dalam pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang sebab rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan.

### **7. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Musyawarah Perencana Pembangunan (Musrebang) di Kelurahan Balangnipa**

Musrenbang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN/RPJMD), serta Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri No. 0008/M.PPN/01/ 2007-050/264.A/SJ, tanggal 16 Januari 2008 perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2008. Peraturan-peraturan tersebut mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing guna mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan, antar (stakeholders) pemangku kepentingan.

Musrenbang adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencana yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (bottom up planning) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (top down planning). Idealnya pelaksanaan Musrenbang melibatkan masyarakat/stakeholder non Pemerintah mulai dari tahapan Proses, Penentuan, dan Pelaksanaan termasuk stakeholder secara bersama memikirkan bagaimana membiayai, dan menuangkan ide-ide dari masyarakat serta mengimplementasikan hasil Musrenbang. Namun kenyataan yang ada, masyarakat di kelurahan Balangnipa cenderung apatis terhadap mekanisme Musrenbang. Hal itu dapat terlihat dari data daftar hadir masyarakat mengenai perencanaan pembangunan di kelurahan Balangnipa. Berdasarkan data tersebut, hanya 40 orang (30-40%) yang hadir dalam rapat dari 128 orang yang diundang dalam Musrenbang. Apalagi kenyataan yang ada hasil Musrenbang bukan menjadi bagian dari amanah yang akan dijalankan tahun berikutnya, akan tetapi terlihat dan terasa oleh masyarakat begitu banyak program yang terlaksana tanpa melalui musyawarah/proses komunikasi antar masyarakat dan pihak pelaksana.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dengan uji Chi-Kuadrat diketahui bahwa factor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana lingkungan permukiman di Kelurahan Balangnipa adalah:

1. Tingkat usia Responden yang partisipasinya rendah dalam pembangunan sarana lingkungan permukiman di Kelurahan Balangnipa adalah kelompok usia muda (0-15 tahun dan 16-35 tahun). Rendahnya partisipasi kelompok muda ini diduga disebabkan masih ada rasa sungkar terhadap para orang tua yang dianggap lebih tua. Responden usia muda, terutama wakil karang taruna jarang sekali ikut menghadiri undangan rapat Musrenbangdes. Golongan tua dianggap lebih berpengalaman dan lebih banyak memberikan pendapat baik berupa masukan, saran dalam hal menetapkan keputusan.
2. Jenis Pekerjaan Responden yang partisipasinya rendah dalam pembangunan sarana lingkungan permukiman di Kelurahan Balangnipa adalah responden yang bekerja sebagai PNS, ABRI, pegawai dan pedagang. Hal ini karena kendala jam kerja di tempat mereka bekerja sehingga akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan sedangkan pada sektor pertanian, pertukangan, dan jasa jam kerjanya lebih fleksibel.

**REFERENSI**

- Arafah, Y., & Winarso, H. (2020). Peningkatan dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Konteks Smart City. *TATALOKA*. <https://doi.org/10.14710/tataloka.22.1.27-40>
- Cresswel, J. (2013). Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. In *Research design*.
- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463>
- Fazaalloh, A. M. (2017). Urbanisasi, Industrialisasi, Pendapatan, dan Pendidikan di Indonesia. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*. <https://doi.org/10.20961/habitus.v1i1.18850>
- Febrianto, S., & Syahbana, J. (2016). Urbanisasi Dan Pengurangan Kemiskinan Di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan. *Teknik Perencanaan Wilayah Kota*.
- Halim, S., & Aziz, F. (2018). Rancang Bangun Aplikasi Layanan E-Commerce Tempat Oleh-Oleh Wisata Anyer. *ProTekInfo(Pengembangan Riset Dan Observasi Teknik Informatika)*. <https://doi.org/10.30656/protekinf.v5i0.714>
- Hariani, A., Aji, D. D., Chamdliyah, L., Alfisnistiawati, R., Sijati, S. S., Hasanah, S. H., & Meiji, N. H. P. (2021). Modal sosial sebagai sarana pembangunan ekonomi masyarakat Kelurahan Kalirejo melalui hidroponik. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.17977/um063v1i4p510-516>
- Krisandriyana, M., Astuti, W., & Fitria Rini, E. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh Di Surakarta. *Desa-Kota*. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v1i1.14418.24-33>
- Kusmiarto, K., Sutanta, H., & Aditya, T. (2020). The Level of Community Participation in Land Registration Activities in Indonesia. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*. <https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.423>
- Mariana, D. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan. *CosmoGov*. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11834>
- Nina, N. (2019). Hubungan Pengetahuan, Sarana, dan Sosial Ekonomi dengan Kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) pada Masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*. <https://doi.org/10.33221/jikm.v8i01.206>
- Pancasasti, R., & Khaerunisa, E. (2018). Analisis Dampak Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Aspek Kependudukan Berwawasan Gender pada Urban Area di Kota Serang. *Tirtayasa Ekonomika*. <https://doi.org/10.35448/jte.v13i1.4231>
- Prayojana, T. W., Fazri, A. N., & Saputra, B. (2020). Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*.
- Puspika Sari, L., Aidil Zetra, & Tengku Rika Valentina. (2020). Peran Ruang Publik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Di Nagari Talang Anau. *Jurnal Niara*. <https://doi.org/10.31849/niara.v13i2.4458>
- R, R., Tamin, R., & Sarjan, M. (2019). Sistem Integrasi Data Musrenbang Desa Berbasis Web. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*. <https://doi.org/10.35329/jiik.v5i1.25>

- Rukmana, S. N., & Cahyaningtias, S. (2021). Pola Sebaran Proses Urbanisasi di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kawistara*.  
<https://doi.org/10.22146/kawistara.63539>
- Suharto, E. (2014). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangun. *Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya*.
- Suprastiyo, A., & Musta'ana, M. (2019). Implementasi Penyusunan Rencana Kerja (RKP) Desa (Studi Di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v2i2.1359>
- Ulumudin, L. M., & Suria, O. (2019). Menentukan Prioritas RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) Dengan Metode Simple Additive Weighting. *JMAI (Jurnal Multimedia & Artificial Intelligence)*. <https://doi.org/10.26486/jmai.v3i1.87>
- watik, D., Trisiana, A., & Novitasari, F. (2022). Analisis Peran Pemerintahan Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk. *Research Fair Unisri*.  
<https://doi.org/10.33061/rsfu.v6i1.6853>